

**KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
Nomor 300 Tahun 2004**

**TENTANG
PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT ADAT SEKO
DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LUWU UTARA**

- Menimbang :
- a. Bahwa masyarakat Adat Istiadat dan Budaya merupakan Pilar utama kerjasama dalam menyelenggarakan Roda Pemerintahan yang harus tumbuh dan berkembang sesuai dengan semangat Undang-Undang Dasar 1945;
 - b. Bahwa di tanah Seko terdapat Adat Istiadat dan Lembaga Adat yang memiliki kearifan tumbuh dan berkembang secara turun temurun dan diakui oleh masyarakat Seko;
 - c. Bahwa maksud huruf (a) dan (b) tersebut diatas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Luwu Utara.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3826);
 2. Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 Tentang Hak Azasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165; Tambahan Lembaran Negara nomor 3886).
 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
 4. Keputusan Menteri Agraria dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 tentang tentang Pedoman Penyelesaian Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat;
 5. Peraturan Daerah kabupaten Luwu Utara Nomor 53 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Luwu

Utara Sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 82);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 12 Tahun 2004 tentang Pemberdayaan, Pelestarian, Pengembangan Adat Istiadat dan Lembaga Adat (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 19).

Memperhatikan : Hasil Rapat Pembahasan Draft Keputusan Bupati Luwu Utara tentang Pengakuan Keberadaan Masyarakat Adat Seko tanggal 2 Desember 2004.

MEMUTUSKAN

**Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA TENTANG
PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT ADAT SEKO.**

BAB I

Ketentuan Umum

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Utara.
2. Bupati adalah Bupati Luwu Utara.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom.
4. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab. Luwu Utara.
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa.
6. Orang Seko adalah orang yang memiliki garis keturunan orang Seko baik yang ada didalam maupun diluar wilayah Adat Seko.
7. Wilayah Adat Seko adalah wilayah yang dipagari oleh Pegunungan, Sungai, Lembah dan Situs-situs Budaya.
8. Adat Istiadat adalah aturan perilaku yang diakui secara bersama-sama oleh suatu masyarakat yang memiliki asal-usul yang sama serta mendiami suatu wilayah tertentu dan memiliki Adat dan Istiadat yang sama.
9. Hukum Adat Seko adalah aturan atau norma yang tidak tertulis yang berlaku dalam setiap wilayah hukum adat Seko, yang bersifat mengatur, mengikat dan dipertahankan serta mempunyai sanksi yang dihargai dan dihormati oleh semua pihak.
10. Kelembagaan Adat Seko adalah Struktur Kepemimpinan Adat dan perangkat-perangkatnya yang memiliki dimasing-masing Wilayah Adat di Seko.

BAB II

PENGAKUAN TERHADAP MASYARAKAT ADAT SEKO.

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

Pemerintah Daerah mengakui Masyarakat Adat Seko sebagai komunitas Masyarakat Adat yang memiliki Tata Nilai, Sistem Hukum Adat dan Kelembagaan Adat.

Bagian kedua

Masyarakat Adat Seko.

Pasal 3

Masyarakat Adat Seko adalah masyarakat yang berdasarkan asal-usul leluhur dan mendiami wilayah adat Seko serta memiliki tata nilai dan atau norma-norma adat istiadat serta lembaga adat yang diakui bersama secara turun temurun dan memiliki kearifan-kearifan lokal.

Bagian ketiga

Daerah dan Wilayah Masyarakat Adat Seko.

Pasal 4

Daerah Seko terdiri dari 3 (tiga) daerah yakni Seko Lemo, Seko Tengah, Seko Padang

Pasal 5

Wilayah Masyarakat Adat Seko meliputi 9 (Sembilan) wilayah hukum adat, yang terdiri dari;

1. Singkalong;
2. Turong;
3. Lodang;
4. Hono';
5. Ambalong;
6. Hoyane;

7. Pohoneang;
8. Kariango;
9. Beroppa'.

Pasal 6

Wilayah hukum adat Seko sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 (lima) akan ditentukan kemudian berdasarkan kesepakatan dengan prinsip keadilan, kejujuran, dan keterbukaan dengan melibatkan pihak-pihak yang terkait.

Bagian keempat

Kelembagaan Masyarakat Adat Seko.

Pasal 7

Masyarakat Adat Seko memiliki 9 (sembilan) kepemimpinan tertinggi di masing-masing wilayah hukum adat tersebut, yakni:

1. To Key Singkalong : Pemangku Adat Singkalong;
2. Tu Bara' Turong : Pemangku Adat Turong;
3. Tu Bara' Lodang : Pemangku Adat Lodang;
4. Tu Bara' Hono : Pemangku Adat Hono;
5. To Bara' Ambalong : Pemangku Adat Ambalong;
6. To Bara' Hoyane : Pemangku Adat Hoyane;
7. To Bara' Pohoneang : Pemangku Adat Pohoneang;
8. To Mokaka Kariango : Pemangku Adat Kariango;
9. To Mokaka Beroppa' : Pemangku Adat Beroppa'.

Pasal 8

Alat kelengkapan lembaga adat sebagaimana disebutkan pada pasal 7 (tujuh) akan disempurnakan lebih lanjut melalui musyawarah adat setempat.

BAB III

PERLINDUNGAN TERHADAP MASYARAKAT ADAT SEKO.

Pasal 9

Pemerintah Daerah wajib melindungi Masyarakat Adat Seko sebagai komunitas Masyarakat Adat yang memiliki Tata Nilai, Sistem Hukum Adat dan Kelembagaan Adat.

Pasal 10

Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 (sembilan) diatas diwujudkan dengan cara:

- a. Setiap pemberian izin pemanfaatan sumber daya alam di Wilayah Masyarakat Adat Seko harus **sepengetahuan** Masyarakat Adat Seko;
- b. Pemerintah wajib memberdayakan, melestarikan, melindungi dan menghormati lembaga adat Seko.

Commented [A1]: Spengetahuan harus diterjemahkan dalam konteks umum, izin prosedur, dampak dan lain-lainya.

BAB IV

Penutup

Pasal 11

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan ataupun penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Masamba
Pada tanggal 23 - 12 - 2004

BUPATI LUWU UTARA

H. M. LUTHFI MUTTY

Diundangkan di Masamba

Pada tanggal, 23 – 12 – 2004

SEKRETARIS DAERAH

DRS. A. CHAERUL PANGERANG

PKT PEMBINA TK 1

NIP : 010 108 780

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2004 NOMOR 25.4.

Tembusan Kepada Yth :

1. Gubernur Prop. Sulawesi Selatan di Makassar;
2. Ka. Badan Koordinasi Wil. I Prop. Sulawesi Selatan di Pare-Pare;
3. Ketua DPRD Kab. Luwu Utara di Masamba;
4. Ka. Bawasda Kab. Luwu Utara di Masamba;
5. Kadis P dan K Kab. Luwu Utara di Masamba;
6. Camat Seko di Eno;
7. Para Kades Kec. Seko;
8. Para Pemangku Adat Kec. Seko;
9. Pertinggal.